



# Saefullah Melawan Demi Ahok

**SEKRETARIS** Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah tetap bersikukuh langkah langkah kebijakan Gubernur Ahok sudah tepat. Pemprov ingin melindungi APBD dari penyimpangan, yakni lewat sistem lelang elektronik (e-budgeting).

Karena itu, Saefullah menyatakan siap berperang melawan DPRD untuk membela Ahok. Tak tanggung-tanggung, mantan walikota Jakarta Pusat itu siap mundur dari jabatan sekda bila Gubernur Ahok dilengserkan DPRD lewat hak angkat. "Kalau dengan (hak) angkat beliau lengser, saya juga siap lengser sebagai sekda," tegas dia.

Pernyataan tegas Saefullah itu untuk memberikan kebenaran universal. Secara gamblang, ia juga menyatakan siap berseberangan dengan dewan. "Saya dengan Lulung saudara. Tapi untuk persoalan APBD, saya sekali lagi, saya taat pada gubernur. Apa yang beliau (Ahok) bicarakan tiap hari, makin dekat saya dengan dia. Sebab yang didengungkan itu kebenaran yang universal. Ini yang saya dukung," tandas dia.

Penerapan e-budgeting, sambung Saefullah, selain menghemat anggaran sebesar Rp 4,3 triliun, juga hasil masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPK Provinsi (BPKP) DKI.

"Berdasarkan evaluasi-evaluasi itu. Yang saya dengar, yang terbaik ada di Surabaya. Makanya, saya rekrut mereka untuk memberi pelatihan e-budgeting," jelasnya. Alasan ini, Saefullah menampik tuduhan ada tim siluman yang menyusun APBD.

Pria yang meraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu kemudian menyebut,

tiap unit dari sekitar 7.000 item yang terpampang di APBD senilai Rp 73,08 triliun itu dipangkas dewan sebesar 10 persen.

Temuan ini diketahui saat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengoreksi. "Kita lakukan penelitian, kasih stabilo, biar tahu di mana bedanya (antara APBD yang diserahkan dewan dengan pemprov ke Kementerian Dalam Negeri). Ternyata, tiap item dikerok (disunat) 10 persen dari nomor satu sampai 7.000-an sekian," beber Saefullah.

Akibat pemotongan itu, sejumlah program pembangunan akan terhambat. "Kalau seperti ini, puskesmas, sekolah, jembatan tidak akan jadi. Jalan tetap berlubang. Jadi, pemotongan 10 persen ini mengganggu program yang sudah dirancang," pungkas dia. **(wok)**



DOK/INDOPOS

Saefullah